

**KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL *MEN COBLONG* KARYA OKA RUSMINI
(KAJIAN SOSIAL KRITIS JURGEN HABERMAS)**

Intan Puspitasari

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
intan.18014@mhs.unesa.ac.id

Drs. Parmin, M. Hum.

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
parmin@unesa.ac.id

Abstrak

Kritik sosial hadir salah satunya sebagai respon dari beragam permasalahan sosial dalam kehidupan, yang timbul akibat dominasi sistem-sistem yang ada di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud rasionalitas teknis yang mendominasi dalam kehidupan masyarakat dan kritik sosial yang termuat dalam novel *Men Cobleng*, karya Oka Rusmini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra, yang berfokus pada analisis aspek-aspek kehidupan sosial, dengan metode penelitian dekriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel berjudul *Men Cobleng*, karya Oka Rusmini, dengan data penelitian, berupa kutipan kalimat atau paragraf dalam novel yang relevan. Menerapkan teknik pengumpulan data baca-catat dan teknik analisis deskriptif. Kajian kritik sosial ini menggunakan sudut pandang pemikiran teori kritis Jurgen Habermas, terkait rasionalitas teknis yang mendominasi dalam kehidupan masyarakat dan komunikasi yang membebaskan melalui kritik sosial dengan tujuan membuka ruang publik, sehingga isu yang dikritik dapat menjadi bahan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan, dalam novel *Men Cobleng* ditemukan rasionalitas teknis telah merambah ke beberapa aspek dalam kehidupan yakni: 1) Di dunia pendidikan (terkait sistem kurikulum pendidikan), 2) Di dalam kehidupan berpolitik, 3) Di kehidupan ekonomi masyarakat, 4) Di dalam proses penegakan hukum 5) Di dalam proses pelayanan kesehatan masyarakat. Rasionalitas teknis mempengaruhi munculnya kritik - kritik sosial yakni: 1) Kritik terhadap sistem kurikulum pendidikan, 2) Kritik terhadap politik, 3) Kritik terhadap kebijakan ekonomi, 4) Kritik terhadap ketidakadilan penegakan hukum, 5) Kritik terhadap pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Kritik Sosial, Habermas, Novel.

Abstract

Social criticism is present, one of which is a response to various social problems in life, which arise due to the dominance of the existing systems in a country. This study aims to describe the form of technical rationality that dominates people's lives and social criticism contained in the novel *Men Cobleng*, by Oka Rusmini. The research approach used is a sociology of literature approach, which focuses on analyzing aspects of social life, with qualitative descriptive research methods. The data source of this research is a novel entitled *Men Cobleng*, by Oka Rusmini, with research data in the form of quote sentences or paragraphs in the relevant novel. Apply reading-note data collection techniques and descriptive analysis techniques. This study of social criticism uses the point of view of Jurgen Habermas' critical theory, related to technical rationality that dominates in people's lives and liberating communication through social criticism with the aim of opening up public space, so that the issue being criticized can be used as evaluation material. The results showed that in the *Men Cobleng* novel, it was found that technical rationality had penetrated into several aspects of life, namely: 1) In the world of education (related to the education curriculum system), 2) In political life, 3) In the economic life of society, 4) In law enforcement process 5) In the process of public health services. Technical rationality affects the emergence of social criticisms, namely: 1) Criticism of the education curriculum system, 2) Criticism of politics, 3) Criticism of economic policies, 4) Criticism of injustice in law enforcement, 5) Criticism of health services.

Keywords: Social Criticism, Habermas, Novel.

PENDAHULUAN

Sastra adalah institusi sosial yang menggunakan medium bahasa, Sastra menyajikan narasi soal kehidupan, yang juga terdiri dari kenyataan sosial. Sastra merupakan ungkapan perasaan masyarakat (Welek, 2016: 98-99). Oka Rusmini, sastrawan sekaligus jurnalis sering memasukkan unsur reportase atau dokumentasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat Bali, maupun di lingkup yang lebih luas yakni negara dalam karya-karyanya. Terutama di kedua karya terbarunya yang disebut “Kembar Buncing” yakni *Koplak* dan *Men Cobleng*, penelitian ini menggunakan *Men Cobleng* sebagai sumber data penelitian.

Novel yang terdiri atas 58 bab cerita ini, mengandung kritik-kritik kepada kebijakan pemerintah hingga peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat, dengan memasukkan fakta-fakta lapangan mengenai penyelewengan maupun ketidaklaziman yang terjadi di birokrasi dan di masyarakat, berlatar tahun 2013 hingga 2018. Tak hanya sekedar membubuhkan fakta-fakta lapangan, sebagai jurnalis, respon mengenai apa yang di lihat sering muncul dalam tulisan Oka Rusmini. Bentuk respon yang keluar yakni berupa kritik yang dituangkan dalam tulisannya, dari sudut pandang seorang tokoh bernama Men Cobleng, (Men adalah sebutan ibu dalam Bahasa Bali) seorang ibu modern asal Bali berusia 40 tahun. Hal itulah yang membuat novel *Men Cobleng* menarik untuk dikaji, terutama mengenai potret keruwetan dan kebobrokan birokrasi serta kritik sosial yang muncul sebagai respon dari ketidakberesan yang ada, sekaligus dapat membuka ruang publik, demi terciptanya keadilan dan kehidupan bernegara, birokrasi yang lebih baik.

Kritik sosial merupakan bentuk komunikasi yang ada dalam masyarakat yang berperan sebagai kontrol terhadap berjalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat (Abar, 1997: 44). Dalam novel *Men Cobleng* muncul beragam kritik sosial yang meyentil beberapa aspek. Sastra kritik akan hadir, di masyarakat ketika ada sesuatu yang janggal di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengarang yang melihat situasi itu, lalu menuangkannya dalam karya untuk menyuarakan hak-hak dan hal-hal yang diyakini benar (Nurgiyantoro, 2013:456).

Dasar pemikiran Jurgen Habermas, berangkat dari konsep mengenai birokrasi yang tak hanya berfungsi sebagai alat pengorganisasian sosial yang memajukan dan mempermudah, namun saat ini birokrasi sudah merambah ke dalam kehidupan sehari-hari, yang memunculkan kekhawatiran akan melemahnya daya emansipasi subjektif manusia (Supraja: 2017: 57) atau dapat diartikan sebagai melemahnya kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana dunia-kehidupan yang secara internal sudah terbagi-bagi, kemudian secara sosial dapat menjadi sebuah

kesatuan (terintegrasi) namun di saat bersamaan muncul resiko konflik terutama dalam ruang tindakan komunikasi yang lepas dari ikatan dengan otoritas dan lembaga? (Habermas, 1998: 26). Menurut Tjahyadi (2003: 183), ada beberapa konsep dan asumsi dasar yang saling berhubungan dan menjadi landasan pembacaan Habermas atas realitas sosial, yakni kepentingan, sistem, dunia-hidup, kolonisasi dunia-hidup, rasionalisasi, dan argumentasi.

Ilmu-ilmu pengetahuan memiliki kepentingan atau tujuan tertentu dalam kehidupan. Ilmu teori kritis memiliki kepentingan kognitif emansipatoris (McCarthy, 2006: 75) atau sederhananya, memiliki kepentingan memberikan ruang untuk bertindak, menilai, dan memecahkan masalah sosial secara bebas, serta memiliki tujuan apresiatif reflektif mengenai kehidupan atau merefleksikan fenomena sosial yang terjadi di kehidupan.

Sistem berkembang dalam dunia-kehidupan mulai dari sistem dalam keluarga, hingga yang lebih besar, sistem hukum, ekonomi, dan negara. Namun, sistem yang mengalami rasionalisasi progresif, akan mengontrol dan mengkoloniasasi dunia kehidupan (masuk dan mendominasi kehidupan manusia). Hal itu membuat sistem menjadi tidak sehat dan menimbulkan dampak yang kurang baik, yang disebut sebagai rasionalitas teknik atau *purposive-rational action*. Dominasi tersebut, menurut Habermas dapat diseimbangkan dengan cara memperluas ruang komunikasi politik yang bebas dari dominasi atau disebut *communicative-rational action*.

Payung besar teori Habermas berbicara soal terjadinya kolonisasi dunia-kehidupan akibat sistem birokratisasi, serta terbatasnya ruang komunikasi yang bebas (Tjahyadi, 2003: 195).

Menurut Sudrajat, Habermas mengungkapkan bahwa hakikatnya masyarakat itu komunikatif. Masyarakat komunikatif tidak melakukan kritik melalui kekerasan melainkan dengan berargumentasi. Argumen menurut Habermas, diartikan sebagai situasi dimana partisipan dalam sebuah komunikasi yang secara kritis mengkaji sebuah klaim tertentu, tentang sebuah hipotesis atas sebuah kebenaran atau validitas (Habermas, 2018: 85).

Di sini, publik sebagai institusi politik “ruang publik”, yang me-lahirkan opini publik seharusnya dapat dibentuk melalui diskusi tanpa kekangan masalah kepentingan umum, tanpa dibebani fungsi kritik dan tanpa dibebani kontrol teknis dalam dunia-kehidupan. (McCarthy, 2006: 17) artinya opini publik sepatutnya bebas.

Habermas (dalam Pusey, 2011: 121) mengatakan, bahwa ekspresi opini publik mengacu pada tugas untuk mengkritik dan mengontrol. yang dilakukan oleh warga negara sebagai badan publik, berhadapan dengan kelas penguasa.

Salah satu sarana komunikasi untuk menyuarakan opini publik, gaga-san, serta argumen adalah melalui kritik

sosial. Kaum kritis, memandang kritik sosial sebagai wahana komunikatif untuk mewujudkan sebuah perubahan sosial (Abar, 1997: 45). Wahana untuk menyampaikan kritik sosial ini, dapat melalui media/pers atau melalui karya sastra. Maka, penelitian sosial kritis tentu dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data utama berupa karya sastra.

Kritik-kritik sosial yang dihadirkan Oka Rusmini dalam novel *Men Cobleng*, selaras dengan konsep teori sosial kritis Habermas. Kritik-kritik tersebut adalah wujud komunikasi yang berupa argumen untuk membuka ruang publik dalam membahas proses birokratisasi yang semakin mendominasi dalam kehidupan sosial dan tidak jarang malah menyudutkan, menyulitkan, atau bahkan merugikan masyarakat sendiri. Dengan harapan, kritik tersebut dapat diterima, paling tidak dapat menjadi bahan refleksi, dan dapat memberikan kontribusi pada perubahan sosial yang lebih baik.

Analisis dengan konsep teori sosial kritis Habermas, bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan wujud-wujud rasionalitas teknis, serta mengupas dan mendeskripsikan kritik sosial yang muncul dalam novel *Men Cobleng*. Terdapat beberapa aspek yang dikritik oleh Oka Rusmini melalui karyanya tersebut, yakni berkaitan dengan pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, dan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud-wujud rasionalitas teknis dalam novel *Men Cobleng* yakni: 1) Rasionalitas Teknis dalam Dunia Pendidikan, 2) Rasionalitas Teknis dalam Kehidupan Berpolitik, 3) Rasionalitas Teknis dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat, 4) Rasionalitas Teknis dalam Proses Penegakan Hukum, 5) Rasionalitas Teknis dalam Proses Pelayanan Kesehatan. Serta, mendeskripsikan kritik-kritik sosial sebagai wujud komunikasi membebaskan yakni: 1) Kritik terhadap sistem kurikulum pendidikan, 2) Kritik terhadap politik, 3) Kritik terhadap ke-bijakan ekonomi, 4) Kritik terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum, 5) Kritik terhadap pelayanan kesehatan. cepat dan akurat, terutama untuk kebutuhan artikel elektronik yang diunggah ke dalam ejournal Unesa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yakni berfokus pada analisis aspek-aspek mengenai kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Dasar pendekatan ini adalah mengenai hubungan hakiki antara masyarakat dan karya sastra (Ratna dalam Hudhana, 2019: 66), serta analisis yang akan berkaitan dengan kehidupan sosial. Penelitian ini berfokus pada kajian sosiologis pada isi dari karya sastra, yakni novel. Kajian sosiologis pada isi karya sastra juga mencakup tujuan, dan makna implisit yang

punya hubungan dengan masalah-masalah sosial. (Ahmadi, 2019: 132)

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan analisis isi yakni mendeskripsikan dan menafsirkan makna dari karya sastra yang dikaji. Berfokus pada analisis isi atau pemaknaan isi pada karya, dalam penelitian ini menggunakan pemahaman sosial kritis Jurgen Habermas.

Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel berjudul *Men Cobleng* karya Oka Rusmini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kutipan dalam sumber data yang menerangkan kritik sosial dalam novel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah baca, catat. Berikut langkah-langkahnya:

- a. Novel dibaca dengan seksama sekaligus penandaan pada bagian-bagian yang akan menjadi data.
- b. Pembacaan ulang bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap novel yang dikaji.
- c. Identifikasi kritik sosial yang ada dalam cerpen berdasarkan data yang sudah ditandai sebelumnya.
- d. Pencatatan dan pengelompokan data berdasarkan sub pembahasan kajian yang sesuai.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dasarnya menerapkan analisis deskriptif, menuturkan dan menafsirkan data yang sudah ada untuk mendeskripsikan dan memaknai kritik sosial yang sudah diklasifikasikan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reduksi, atau pemilihan data yang dianggap penting.
- b. Menyajikan data sebagai bukti, serta mencantumkan penjabaran terkait data. Data yang sudah dikelompokkan ditelaah kembali dan disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, data dideskripsikan dan dianalisis.
- c. Melakukan riset *open source* di internet terkait kasus/berita sebenarnya yang termuat dalam data sebagai bahan tambahan dan penguat hasil analisis.
- d. Hasil analisis diteliti kembali, dan ditarik simpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wujud-Wujud Rasionalitas Teknis dalam Novel *Men Cobleng*

Rasionalitas teknis secara sederhana merupakan proses birokratisasi melalui peraturan-peraturan instrumental, dimana pada praktiknya, yang seharusnya berperan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur, namun ternyata malah mendominasi, merambah dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dalam novel *Men Cobleng*, digambarkan beberapa aspek dimana dominasi dari rasionalitas teknis dapat merambah terlalu jauh ke dalam kehidupan, sehingga menimbulkan beberapa efek yang akhirnya merugikan masyarakat sendiri.

Pada butir pembahasan ini, akan diklasifikasikan beberapa aspek yang diindikasikan terkena dampak rasionalitas teknis, yakni di dalam dunia pendidikan, kehidupan berpolitik, kehidupan ekonomi masyarakat, dalam proses penegakan hukum, dan dalam proses pelayanan kesehatan. Penjelasan pada poin ini, adalah berupa identifikasi awal mengenai rasionalitas teknis pada aspek-aspek tersebut, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih spesifik mengenai kritik sosial yang dituangkan pengarang dalam novel sebagai respon dari adanya rasionalitas teknis tersebut.

a. Rasionalitas Teknis dalam Dunia Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek yang penting bagi setiap orang, dan memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kemajuan serta perkembangan suatu negara. Pemerintah sendiri memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan dan menentukan sistem pendidikan seperti apa yang diterapkan secara nasional. Seperti melalui kebijakan perubahan kurikulum atau kebijakan mengenai biaya untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Dalam Novel *Men Cobleng*, diceritakan soal bagaimana kurikulum 2013 yang mengedepankan pendidikan karakter, kala itu mulai diterapkan dengan sosialisasi di lapangan yang ternyata belum matang sepenuhnya, padahal anggaran yang dipatok untuk kebijakan tersebut terhitung sangat fantastis.

Anggaran kurikulum sudah tertata rapi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAK/L) Kemendikbud 2013 dengan rincian, tentang kurikulum Rp631 miliar. Dana pendukung Rp1,1 triliun. Pos anggaran dari alokasi dana khusus (DAK) Rp748 miliar. (Rusmini, 2019:02)

Angka yang besar tersebut, tentu diiringi dengan harapan agar penerapan kurikulum baru yang lebih "berkarakter" tersebut dapat menjangkau seluruh sekolah dengan mulus. Kenyataannya, tidak semulus itu. Muncul dampak-dampak atas ketidak siapan transisi ke kurikulum

baru tersebut. Pertama, sosialisasi yang tidak matang, berdampak pada ketidaksiapan lembaga pendidikan (sekolah), tenaga pengajar (guru), bahkan orang tua siswa. Sehingga siswa yang notabennya adalah sebagai konsumen kurikulum tersebut, tidak akan bisa mendapatkan pembelajaran yang dibutuhkan. Jika ditarik ke dampak yang lebih jauh, ketika anak tidak punya bekal yang cukup, kedepannya akan menyulitkan anak sendiri dalam belajar. Ketika anak kesulitan, dan sekolah tidak lagi bisa diandalkan, orang tua yang juga tidak memahami konsep pendidikan yang diterapkan, tentu juga akan kebingungan. Akhirnya orang tua banyak yang memasukkan anaknya ke lembaga belajar tambahan atau les. Pengeluaran uang pun meningkat, dan anak juga tersita waktu istirahat dan bermainnya karena harus les. Akibat-akibat tersebut merupakan imbas dari penerapan kebijakan yang belum siap.

b. Rasionalitas Teknis dalam Kehidupan Berpolitik

Politik, pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Politik erat kaitannya dengan pemerintahan. Sederhananya, ia berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengatur tatanan, dan menerapkan kebijakan. Dunia politik adalah sesuatu hal yang kompleks dan penuh dengan hiruk pikuk yang membingungkan. Seperti yang tergambar pada data berikut.

Hiruk pikuk jadi orang nomor dua justru lebih heboh. Tidak ada ide atau pemikiran cergas dan cerdas untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Beragam isu yang ditawarkan justru membuat pesimis. Bagaimana mereka berpikir ingin menjadi pemimpin? Apa yang sesungguhnya ada di dalam hati dan pikiran mereka? Sadarkah mereka bahwa liku dan laku mereka membuat rakyat berpikir? Maunya apa sih? (Rusmini, 2019:155)

Data tersebut menggambarkan bagaimana persaingan politik menjelang pemilu serentak 2019 lalu, dimana kala itu, persaingan untuk mengisi kursi wakil presiden untuk calon petahanan Joko Widodo sangat sengit dan sering dibicarakan. Tak hanya mengenai calon wakil presiden, namun seluruh calon legislatif maupun calon kepala daerah juga sedang gear-gencarnya melakukan kegiatan pra kampanye hingga kampanye. Banyak muncul isu-isu yang membingungkan calon pemilih. Banyak desas desus terkait calon-calon yang akan maju di pemilu.

Tak hanya itu, tindakan para caleg dan calon pemimpin menjelang pemilu untuk mendapatkan simpati masyarakat juga beragam, seperti tiba-tiba memberikan bantuan berupa materi, atau membuat slogan-slogan, kata-kata inspirasi yang diselipi janji-janji mengenai masa depan Indonesia yang lebih baik. Fenomena seperti itu selalu terjadi setiap lima tahun sekali, menjelang pemilu. Bagaimanapun

caranya, parpol harus memaksimalkan momen untuk memenangkan kontestasi politik.

Pemerintah dengan berbagai aturan perundang-undangan soal runtutan proses pemilu, ditambah kegiatan-kegiatan partai politik yang gencar dan belum tentu bersih, sangat berpengaruh pada pola pikir masyarakat terutama terkait bagaimana memilih pemimpin yang baik. Tak hanya itu, jika ditarik lebih jauh, proses panjang terkait pemilu tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, dapat memicu terbentuknya kubu-kubu tertentu di masyarakat, yakni kubu pendukung dan non pen-dukung dari masing-masing calon. Tidak menutup kemungkinan, akan terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan, yang bahkan dapat memicu kekisruhan antar masyarakat sendiri.

c. Rasionalitas Teknis dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Negara punya tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu hal yang disentil dalam novel Men Cobleng adalah kebijakan BLSM yang diterapkan saat masa pemerintahan SBY. BLSM atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat menysasar rakyat miskin untuk membantu perekonomian mereka ketika terjadi kenaikan BBM. Namun kebijakan ini, tak tepat sasaran. Masih banyak warga miskin yang ternyata tak tercatat menerima BLSM, sementara ada warga yang masih cukup mampu namun mendapat jatah bantuan.

Selaku ketua RT, pihaknya justru menerima BLSM dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang menurutnya tidak ia butuhkan. Sementara tujuh orang lain yang lebih berhak, diantaranya janda dan duda justru tidak mendapat jatah. (Rusmini, 2019:59)

Kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut, tentu akan menguntungkan bagi beberapa pihak, namun tidak berdampak apa-apa pada yang benar-benar membutuhkan. Hal itu justru malah memper-buruk problem ekonomi yang harusnya selesai dengan program tersebut. Selain itu, program BLSM secara tidak langsung hanya memberikan solusi instan bagi masyarakat, karena program tersebut sifatnya sementara, maka bantuan tidak akan diberikan untuk jangka waktu yang lama. Tidak ada proses berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang justru menambah pekerjaan baru kedepannya bagi pemerintah, serta bagi rakyat sendiri, karena tidak memiliki keterampilan atau modal lain untuk mendapat penghasilan yang lebih baik.

d. Rasionalitas Teknis dalam Proses Penegakan Hukum

Istilah Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, sering disuarakan untuk menegaskan bahwa perihal peradilan dan

keadilan di negeri ini, masih memandang status sosial dan jabatan.

Belum lagi kasus duo aparat penegak hukum DS (Djoko Susilo) yang tidak jelas hukumannya. Kasus SD (Susno Duedji) yang aneh dan tidak masuk akal. Hukum memang tumpul ke atas...(Rusmini, 2019: 21)

Kasus yang disentil dalam data di atas adalah kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Dilansir dari berita Detik.com dan Liputan6.com, proses peradilan dari kedua kasus pejabat tersebut berlangsung sangat lama dengan beragam sangkalan dari pelaku. Di sisi lain banyak kasus yang jauh lebih sepele seperti pencurian sendal atau pencurian kayu yang menjerat rakyat miskin, malah diproses dengan serius dan menghasilkan hukuman yang berat untuk tindakan pidana yang sangat ringan. Ketidakseimbangan dalam proses penegakan hukum ini, sangat disayangkan dan selalu memunculkan pertanyaan bagi semua orang. Proses hukum yang dicemari oleh kepentingan pihak-pihak tertentu, tentu membawa dampak yang jauh lebih berbahaya dalam kehidupan. Seperti, makin melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada aparat dan penegak hukum, yang berbuntut pada maraknya laporan mengenai perilaku kejahatan di media sosial, dan makin maraknya kejahatan karena ketakutan korban akan proses peradilan yang menyulitkan. Kehidupan bermasyarakat pun tidak lagi dapat benar-benar damai.

e. Rasionalitas Teknis dalam Proses Pelayanan Kesehatan

Pemerintah tentunya punya andil dalam pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Kesehatan masyarakat pada dasarnya dijamin oleh negara. Maka dari itu, pelayanan kesehatan yang baik bagi rakyat adalah hal yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh negara. Untuk itu, pemerintah juga sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi terwujudnya tujuan tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI pada masa pemerintahan Gubernur Jokowi, yakni membuat KJS atau Kartu Jakarta Sehat bagi warga kurang mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di rumah sakit.

Men Cobleng mendengar berita tentang Gubernur DKI Jakarta 2012-2014, Jokowi, mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) agar warga tak mampu bisa menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan Jokowi. Namun faktanya orangtua Dera tidak bisa memanfaatkan kartu tersebut saat meminta pelayanan di sebuah rumah sakit. (Rusmini, 2019:7)

Data tersebut menyebutkan bahwa program KJS yang diklaim merupakan salah satu program unggulan, pada kenyataannya di lapangan masih ada masyarakat miskin

yang tidak bisa merasakan manfaatnya. Salah satu contohnya adalah kasus Dera yang juga dijelaskan dalam novel *Men Cobleng*. Bayi asal Jakarta Selatan yang lahir dengan gangguan pada pernafasannya yang meninggal dunia setelah ditolak oleh 10 rumah sakit di Jakarta, dengan alasan peralatan yang tidak memadai atau kamar penuh. Dilansir dari Tempo, salah satu rumah sakit bahkan meminta biaya sebesar Rp10 juta. Saat itu, kondisi orang tua Dera masih belum memiliki KJS, namun sebelumnya saat kelahiran Dera puskesmas membebaskan biaya dengan menyertakan dokumen berupa KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu. Dilansir dari web Jakarta.go.id, syarat mendapatkan pelayanan gratis jika belum memiliki KJS adalah dengan menunjukkan ketiga berkas tersebut. Hal itu menandakan bahwa, program pelayanan kesehatan gratis rupanya tidak terealisasi dengan baik, serta menjadi indikasi bahwa ada yang masih belum matang dalam sistemnya. Hal tersebut berimbas pada terenggutnya hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Bahkan jika melihat kembali kasus bayi Dera, kecacatan dalam sistem pelayanan kesehatan bahkan bisa merenggut nyawa.

2. Kritik-Kritik Sosial dalam Novel *Men Cobleng*

Kritik sosial yang tertuang dalam novel *Men Cobleng*, merupakan wujud respon dan argumen kepada bentuk rasionalitas teknis yang sudah dipaparkan sebelumnya. Oka Rusmini, melalui *Men Cobleng*, mengkritisi beragam aspek birokratisasi yang merambah dalam kehidupan sosial manusia sehari-hari. Berikut adalah macam-macam aspek yang dikritik dalam novel tersebut.

a. Kritik terhadap Sistem Pendidikan

Kebijakan-kebijakan terkait kurikulum pendidikan yang dicanangkan pemerintah terkadang tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan hasilnya tidak semulus seperti yang digadang-gadangkan. Pada 2013 lalu, Kemendikbud mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13), untuk menggantikan Kurikulum 2006 (KTSP). Tujuan kurikulum ini utamanya adalah membentuk siswa yang berkarakter, dengan menuntut siswa agar mampu berpikir lebih kreatif, cepat tanggap dan inovatif, dengan memasukkan unsur-unsur pelajaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum ini menuai pro dan kontra. Pertama, kenyataan bahwa dalam penerapan kurikulum tersebut ternyata belum disosialisasikan dengan baik. Seperti yang tampak pada data berikut,

Begitu mudahnya kurikulum diubah-ubah tanpa sosialisasi. Bahkan pemilik kebijakan, Mohammad Nuh dengan tegas berkata “...Bukan waktunya lagi memperdebatkan kurikulum 2013 halal atau haram dan benar atau salah.” (Rusmini, 2019: 1)

Kurikulum KTSP yang sudah berjalan selama 6 tahun lamanya, yang kemudian diubah menjadi sistem baru, tentu membutuhkan kesiapan yang matang, tak hanya bagi salah satunya orangtua siswa seperti *Men Cobleng*. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Kemendikbud kukuh pada kebijakan yang dikeluarkan. Kurang matangnya sosialisasi sistem pendidikan K-13 ini, akhirnya menimbulkan permasalahan lain, seperti yang tampak pada data berikut,

Sebagai konsumen yang akan menggunakan “baju” kurikulum 2013, pendidikan karakter bisa jadi sia-sia. Anak hanya dicekoki konsep dan teori tanpa memiliki teladan untuk menerapkannya. Bagaimana anak didik bisa menerapkan pendidikan karakter, kalau beberapa guru tega menurunkan peringkat seorang anak di kelas karena orangtua anak itu lebih care kepadanya, dan lebih rajin memberi hadiah-hadiah? (Rusmini, 2019: 2)

Data tersebut mengkritik persoalan ketidaksiapan lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut justru akan membuat tujuan pendidikan karakter jadi sia-sia. Pelajaran yang hanya terpaku pada teori tanpa ada arahan dan praktik konkret, belum tentu dapat membuat siswa jadi benar-benar paham dengan apa yang diajarkan. Paham teori belum tentu tahu praktiknya seperti apa. Belum lagi fakta di lapangan, dimana masih ada beberapa guru yang pilih kasih kepada muridnya, atau bahkan ada yang sengaja membocorkan soal ujian pada anak-anak yang les di gurunya, tindakan itu tentu tidak bisa menjadi contoh pendidikan karakter untuk anak.

Dari data-data tersebut, Oka Rusmini sebagai penulis melalui tokoh *Men Cobleng* mengkritik kurikulum 2013 yang masih belum matang ditambah ketidaksiapan lembaga pendidikan dalam mengaplikasikan sistem tersebut di sekolah, serta tidak disiplinnya tenaga kependidikan yang menjalankan sistem. Padahal anggaran untuk program tersebut mencapai triliunan rupiah, namun nilai tersebut belum sepadan dengan tujuan pendidikan karakter yang digadang-gadangkan sebelumnya.

Selain kritik kepada kurikulum 2013, novel *Men Cobleng*, juga menyentil berita soal edaran Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Bali, bahwa mulai tahun 2013/2014 sekolah-sekolah negeri di Bali mulai SD-SMA/ sederajat, tidak diperkenankan memungut biaya pendidikan awal tahun kepada orang tua siswa, namun masih memperbolehkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara sukarela. Yang artinya, masih ada cela yang memungkinkan adanya pungutan dana di sekolah, yang bisa dibelokkan dengan dalih “sumbangan sukarela”. Data berikut merupakan kritik terhadap aturan tersebut,

Men Cobleng selalu membayangkan di negerinya ini ada aturan-aturan yang jelas. Tindak penuh geripis itu

menjadi tafsir-tafsir yang mudah diselewengkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan peluang.

“Kalau kau ingin mendapatkan pendidikan yang bagus, kau harus diam? Untuk apa protes? Yang rugi juga anak kita. Bagaimana kalau anak kita ditekan? Lalu tidak mau sekolah? Siapa yang rugi? Negara?” (Rusmini, 2019: 31)

Data tersebut mengandung kritik bahwa di negeri ini banyak aturan/kebijakan yang abu-abu dan kurang tegas, contohnya aturan larangan pemungutan biaya oleh Disdikpora yang disentil sebelumnya. Seakan-akan cela tersebut memang sengaja dibuat untuk diselewengkan atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Narasi tersebut, juga secara satir mengkritisi bahwa, melakukan protes kepada peraturan yang ditetapkan ujung-ujungnya sia-sia, dan malah berbalik merugikan diri sendiri, karena pada dasarnya, semua keputusan ada di tangan pihak yang berwenang, pemerintah. Protes dari rakyat kecil, kurang mempan menggugah pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan yang mereka tetapkan.

b. Kritik Terhadap Politik

Politik adalah segala aktivitas atau tindakan dalam suatu sistem politik atau negara, yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakannya (Miriam Budiarjo dalam Nambo, 2005: 265). Tujuan praktis dari politik adalah menumbuhkan karakter da-lam tatanan moral politis yang memandang masyarakat dapat menjalan-kan kehidupan yang baik dan adil. Subjek material politik adalah berupa kondisi-kondisi dalam kehidupan yang berubah-ubah dan sifatnya sementara. Kedua hal tersebut menentukan status kognitif dari politik itu sendiri. (McCarthy, 2006: 2). Politik pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sayangnya, proses politik yang seharusnya bersih sehingga tujuan dari politik yang baik dapat tercapai, kerap kali malah disusupi dengan berbagai kepentingan golongan-golongan tertentu. Hal tersebut juga menjadi salah satu topik yang dikritik dalam novel *Men Cobleng*, yakni tergambar dalam data berikut.

Hiruk pikuk kondisi politik saat ini benar-benar lebih heboh dari area sabung ayam yang biasanya terjadi di hari-hari besar di lingkungan perumahan Men Cobleng.... Kenapa orang-orang itu tega memainkan peran yang “menyakiti” hati nurani rakyatnya? Mereka menebar teror. Menebar isu-isu yang justru membuat calon pemilihnya seperti dicekoki untuk jadi pandir. (Rusmini, 2019:154)

Data tersebut, diambil dari bab cerita berjudul *Komedi* menggambarkan situasi politik pada 2018 lalu menjelang pemilu serentak tahun 2019, yang semakin panas. Dilansir dari berita di CNN Indonesia tahun 2018 lalu, UU Pemilu mematok batasan sebesar 20 persen kursi DPR atau 25

persen suara sah nasional agar parpol bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu membuat 16 partai yang waktu itu sudah ditetapkan KPU untuk maju ke pemilu, berbondong mencari rekan koalisi agar bisa mengusung capres dan cawapres. Maka, partai-partai tersebut akan melakukan segala cara agar bisa kebagian tempat di parlemen.

Oka mengkritik para aktor politik yang menjadikan momen menjelang pemilu menjadi ajang untuk menebar isu-isu, dan janji-janji yang mem-buat masyarakat sebagai calon pemilih makin bimbang dengan kandidat pilihannya. Rakyat digiring ke opini-opini yang tidak tentu benar demi mendapatkan atensi dan suara. Dan seringkali isu dan janji yang muncul memang dibuat untuk menurunkan kredibilitas calon satu dengan yang lainnya atau partai satu dengan lainnya. Seringnya janji-janji yang diutarakan saat kampanye juga hanya tinggal janji, tanpa realisasi yang pasti.

Selain itu, Oka juga menyinggung perihal bagaimana panasnya situasi perebutan posisi wakil presiden untuk capres petahanan waktu itu yakni Jokowi, seperti yang digambarkan pada data berikut,

Para petinggi partai yang “mejang” dan terlihat kharismatik seolah ingin mneyelamatkan Indonesia justru ujung-ujungnya meminjam sampiran-sampiran dari partainya untuk mengatakan bahwa pemimpin partainya yang cocok mendampingi sang presiden. (Rusmini, 2019: 154)

Data tersebut menggambarkan permainan para aktor politik. Mereka selalu berusaha tampil kharismatik demi mendapatkan simpati masyarakat. Dengan tujuan untuk mendapatkan panggung dan suara bagi partainya ketika pemilu nanti, dan tentunya agar partai dapat kebagian tempat dan bisa berkoalisi dengan partai yang kredibilitasnya lebih tinggi.

Di sisi lain, situasi politik kala itu, juga dimanfaatkan partai untuk meraup keuntungan dari sumbangan dana, seperti yang terepresentasi pada data berikut,

“.... Kau lihat saja, ketika dana sumbangan pilkada diwajibkan untuk dilaporkan. Kau tau apa jawabannya? Mereka yang disumbang menga-takan: yang menyumbang itu hamba Tuhan. Tuhan saja mereka persekusi untuk menutupi beragam kebobrokan mereka.” (Rusmini, 2019:162)

Dilansir dari artikel di Detik.com, dana yang masuk untuk partai punya batasan tertentu. Menurut peraturan KPU No.5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 7 ayat 1 sampai 3, mengatur batas maksimal sumbangan dana kampanye yang dapat diterima oleh pasangan calon dalam Pilkada, baik itu dana dari donatur perseorangan maupun dari lembaga. Selain itu, dana sumbangan pilkada dari

donatur wajib dilaporkan ke BPK. Namun partai dengan mudahnya membelokkan peraturan tersebut dengan menyatakan bahwa dana sum-bangan tersebut dari hamba Tuhan, agar dana sepenuhnya dapat mulus masuk ke kas partai. Lagi-lagi demi keuntungan golongan.

Praktik permainan politik lain juga nampak pada data berikut,

Aturan larangan eks nabi korupsi menjadi caleg yang digodog KPU masih mendapat penolakan. Sungguh suatu hal yang aneh masa sih ada orang yang “tega” dan bersedia memilih wakilnya yang hobi korupsi? (Rusmini, 2019:186)

Kala itu KPU yang tengah merancang aturan tentang larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif pemilu. Aturan tersebut tentu akan jadi salah satu syarat yang patut dipertahankan, demi mendapatkan pemimpin yang bersih dari korupsi, dan tentu akan membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun yang janggal adalah, aturan tersebut masih memunculkan penolakan dari beberapa pihak. Hal tersebut tentu menimbulkan spekulasi bahwa, masih ada pihak yang ingin melanggengkan praktik korupsi di negeri ini, dan tentunya masalah ini sepatutnya dikaji lebih lanjut serta ditangani demi mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.

c. Kritik Terhadap Kebijakan Bidang Ekonomi

Sebagai orang awam, kita melihat bahwa salah satu akar masalah yang bercabang sehingga membuat ruwet aspek-aspek lainnya adalah permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi seakan jadi inti dari tidak maksimalnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah sangat sering membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Namun, seperti yang kita tahu, tidak semua kebijakan mereka berbuah manis dan berhasil menuntaskan masalah yang ada.

Pada masa pemerintahan SBY periode kedua, kala itu sempat terjadi kenaikan harga BBM. Pemerintah membuat program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk membantu masyarakat miskin sebagai kompensasi karena kenaikan harga bahan bakar. Novel *Men Cobleng*, memuat kritik mengenai kebijakan ini, nampak pada data berikut,

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diberikan pemerintah untuk kompensasi kepada masyarakat miskin akibat ke-naikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tujuan utamanya adalah agar masyarakat tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan yang makin dalam... Sepertinya masyarakat bukan diajar untuk mandiri, kuat, dan mampu mencari jalan keluar bagi kehidupannya. Masyarakat justru diajarkan untuk menerima uang yang nominalnya cukup “mengerikan” untuk bertahan hidup di tengah guncangan ekonomi seperti ini. (Rusmini, 2019: 60)

Melalui data tersebut, Oka Rusmini melalui *Men Cobleng* mengkritik persoalan terkait BLSM. Meskipun tujuan utama dari bantuan tersebut adalah untuk membantu rakyat agar tidak makin terpuruk karena BBM mahal, namun di sisi lain, bantuan yang diberikan jumlahnya kecil dan tidak terlalu membantu masyarakat secara signifikan. Dilansir dari berita Kompas.com pada 2012 soal bantuan langsung tunai, nominal bantuan yang didapat masyarakat adalah sekitar Rp. 150 ribu saja per bulan, dan diberikan per tiga bulan, angka ini bisa dibilang kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan dan biaya hidup yang membengkak kala itu. Belum lagi, kenyataan yang terjadi di lapangan, penerima BLSM belum merata dan ada yang tidak tepat sasaran. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam program bantuan tersebut. Hal itu menunjukkan indikasi adanya penyelewengan dana BLSM.

Oka juga mengkritik ketidakefektifan program tersebut dalam membantu masyarakat, karena masyarakat cenderung hanya diberikan bantuan materil yang sifatnya tidak bertahan lama, atau cepat habis. Akan lebih baik jika pemerintah memberikan fasilitas yang membantu meningkatkan kompetensi masyarakat agar mereka lebih mandiri sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Kebijakan seperti itu justru tidak akan bisa memperbaiki ekonomi rakyat untuk jangka panjang, dan malah membuat masyarakat ketergantungan dengan bantuan dari pemerintah.

Selain mengkritik soal BLSM, kritik mengenai pajak juga hadir dalam novel *Men Cobleng*, seperti yang nampak pada data berikut,

“Anggaran justru malah digunakan untuk bancakan. Karena itu pajak belum menyentuh rakyat. Pajak belum dirasakan oleh rakyat, karena masih banyaknya penjarahan. Banyak rakyat susah, infrastruktur han-cur, jalanan rusak. Padahal rakyat sudah bayar pajak kendaraan yang dimilikinya. Rakyat kita itu adalah rakyat yang sopan. Selalu manut. Selalu nurut. Selalu oke. Apapun keputusan yang diambil oleh pemimpin di negeri ini.” (Rusmini, 2019: 98)

Dilansir dari artikel berita Kompas.com, pada dasarnya pajak yang dibayarkan rakyat punya 4 fungsi inti bagi pembangunan negara, yakni berfungsi menjadi sumber pendanaan dan anggaran, meregulasi peran masyarakat dalam pendanaan negara, berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, dan redistribusi anggaran untuk pembangunan negara sesuai keperluan. Namun pada kenyataannya, pajak tak seratus persen digunakan untuk keperluan negara, buktinya, banyak kasus-kasus soal pihak-pihak yang bermain dengan dana pajak, sehingga pajak yang seharusnya mengalir untuk keperluan perbaikan dan pembangunan infrastruktur malah raib dibawa koruptor.

Akibatnya banyak daerah-daerah terutama di pelosok yang belum menikmati infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktifitas sehari-hari penduduknya. Banyak jalan-jalan yang rusak tidak segera di-perbaiki, atau bahkan sering kita dengar jembatan antar kampung yang tidak diperbaiki bahkan tidak dibangun, padahal jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Akhirnya rakyat menyeberang sungai dengan alat seadanya. Rakyat kecil hanya bisa menerima keadaan yang terjadi, sementara pihak berwenang di atas sana, menjarah uang yang dibayarkan rakyatnya untuk membangun negeri ini, untuk kepentingan pribadi.

d. Kritik Terhadap Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum

Serangkaian hukum atau peraturan-peraturan pada dasarnya berfungsi untuk mengontrol tingkah laku masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang lebih tenteram, dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Habermas dalam Pusey (2011: 49) berpendapat bahwa, Hukum tidak boleh menjadi instrumen sewenang-wenang untuk melegitimasi apapun atau segala hal, karena hukum berhubungan erat dengan klaim-klaim kebenaran, meskipun itu kadang berlawanan dengan kenyataan. Namun di Indonesia, hukum adalah salah satu elemen penting yang sering dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama jika terkait dengan kekuasaan. Oka Rusmini dalam Men Cobleng juga mengkritik bobroknya hukum di negeri ini, terbukti pada data berikut.

Belum lagi kasus duo aparat penegak hukum DS (Djoko Susilo) yang tidak jelas hukumannya. Kasus SD (Susno Duadji) yang aneh dan tidak masuk akal. Hukum memang tumpul ke atas, Men Cobleng setuju dengan itu. Namun itu kan wacana? Wacana Rakyat. Para pengambil kebijakan tidak terpengaruh. Buktinya santai saja ditangkap KPK. Sementara BBM dinaikkan untuk menghemat APBN Indonesia, ... (Rusmini, 2019: 21)

Pada 2012 dan 2013 lalu, ramai dua kasus korupsi besar yang menyeret aparat penegak hukum. Yakni kasus korupsi pengadaan simulator SIM dengan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo yang dulunya adalah seorang Karkolantas Polri. Kedua adalah kasus korupsi penanganan perkara perusahaan Ikan Arwana, dan kasus dana pengamanan Pemilu Jabar tahun 2008, yang melibatkan mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji. Namun, penanganan hukum pada kedua pejabat ini, malah bertele-tele dan penuh dengan permainan politis. Dilansir dari artikel Liputan6, Susno bahkan sempat menolak untuk ditahan, menjadi buronan, hingga meminta perlindungan LPSK

(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pada beberapa kasus yang menjerat pejabat, hukuman yang dibebankan seakan diringankan.

Sementara itu, kasus-kasus yang menjerat rakyat biasa, seperti misalnya kasus pencurian buah Kakao yang nilainya tidak sampai 10 ribu rupiah, oleh Nenek Minah asal Banyumas, berusia 55 tahun, pada 2009 lalu. Nenek tersebut divonis 1,5 tahun penjara. Contoh kedua, pencurian sandal jepit milik seorang briptu oleh pelajar SMK di Sulawesi Tengah berusia 15 tahun, yang pada 2012 lalu diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Data tersebut mengkritik hukum Indonesia memang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Keadilan hanya milik orang-orang yang punya kuasa. Di sisi lain, akibat dana negara yang dikorupsi, rakyat lagi-lagi kena imbasnya, dengan dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar, demi menghemat APBN negara.

e. Kritik Terhadap Pelayanan Kesehatan

Salah satu kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang baik kepada rakyatnya. Namun kenyataannya, pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang maksimal dan cenderung belum memadai untuk seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah. Dilansir dari artikel di Kompas.com, menurut Founder dan Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) Indonesia menerangkan bahwa, ada 6 kendala yang perlu dibenahi secepatnya, terkait pelayanan kesehatan di Indonesia, yakni mengenai konektivitas atau digitalisasi layanan kesehatan yang masih belum bisa dijangkau secara luas, regulasi yang ruwet, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, distribusi yang belum merata karena kita negara kepulauan, serta payahnya pelayanan kesehatan. Ditambah lagi, tantangan kedepannya yakni bonus demografi, dimana penduduk muda akan semakin banyak, sementara pelayanan kesehatan bagi mereka belum memadai. Kritik yang berkaitan dengan hal tersebut juga dituangkan Oka Rusmini dalam novel Men Cobleng, yakni pada data berikut,

Tidak salah kalau Jokowi bisa menang telak dengan iming-iming kampanye Kartu Jakarta Sehat (KJS), ternyata masyarakat sangat memerlukan perhatian khusus di bidang kesehatan Berharap, tepatnya. Kesehatan gratis dan pelayanan yang baik. Walaupun sampai sekarang faktanya masih terengah-engah. Pelayanan kesehatan di negeri ini masih "berat", padahal kalau semua berfungsi, puskesmas bisa jadi alternatif berobat yang paling gampang dijangkau. Namun sayangnya pelayanannya masih "payah". Seringkali dokternya tidak ada. Tenaga medis terlalu banyak menangani pasien sehingga terkesan tidak ramah. (Rusmini, 2019: 10)

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang bisa dijangkau atau bahkan gratis,

merupakan harapan dari rakyat. Apalagi sampai saat ini, biaya rumah sakit cenderung masih mahal dan tidak bisa dijangkau masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Padahal seharusnya, layanan kesehatan yang baik, bisa dirasakan seluruh rakyat. Puskesmas yang jadi harapan bagi masyarakat desa, kenyataannya belum bisa memberikan pelayanan yang baik.

Di sisi lain, kebijakan mengenai KJS yang dicanangkan Jokowi, tidak sepenuhnya benar-benar terlaksana dengan baik, malah justru memakan korban, seperti kasus bayi Dere, yang dibahas pada poin rasionalitas teknis dalam pelayanan kesehatan sebelumnya.

PENUTUP

Simpulan

Perspektif sosial kritis Jurgen Habermas memuat beberapa konsep yang saling berhubungan satu sama lain yakni tentang kepentingan, rasionalisasi, dunia-hidup, kolonisasi dunia-hidup, sistem, dan argumentasi. Berangkat dari konsep-konsep tersebut, secara spesifik terdapat dua poin utama yang menjadi fokus dalam kajian terhadap novel *Men Cobleng* ini, yakni mengenai wujud rasionalitas teknis yang mendominasi dalam kehidupan masyarakat dan cara untuk menyeimbangkan dominasi tersebut yakni dengan komunikasi yang membebaskan yakni melalui kritik sosial.

Dalam novel *Men Cobleng*, rasionalitas teknis telah masuk terlalu jauh ke beberapa aspek dalam kehidupan. *Pertama*, di dunia pendidikan. Hal ini terkait penerapan sistem kurikulum pendidikan yang belum matang disosialisasikan, sehingga menyebabkan ketidaksiapan lembaga pendidikan, pengajar, dalam mendidik anak sesuai kurikulum yang diterapkan, yang berujung pada pembelajaran yang tidak maksimal. Hal ini membuat orang tua siswa, was-was dan akhirnya mengeluarkan biaya lebih banyak untuk memberikan les akademis tambahan bagi anak. Di sisi lain, anak akhirnya kehilangan waktu bermain dan eksplorasi di dunia luar karena harus les.

Kedua, di dalam kehidupan berpolitik, mengenai dampak permainan politis panas oleh pemerintah, para caleg, calon pemimpin, dan partainya, yang terjadi ketika menjelang pemilu serentak yang diwarnai dengan isu-isu dan tindakan lain yang dibuat demi kepentingan meraih suara rakyat, malah membuat rakyat sendiri makin bingung menentukan pilihan. Dampak yang lebih serius, yakni munculnya kubu-kubu pendukung para calon, yang dapat memicu perpecahan dalam lingkup masyarakat sendiri.

Ketiga, di kehidupan ekonomi masyarakat, yakni mengenai diterapkannya kebijakan pemberian BLSM kepada warga miskin, yang tidak tepat sasaran dan secara tidak langsung, tidak akan berdampak secara jangka

panjang dan signifikan terhadap perekonomian rakyat miskin.

Keempat, di dalam proses penegakan hukum. Poin ini terkait dengan bagaimana proses hukum yang menjerat para aparat justru lebih longgar daripada proses hukum yang menjerat rakyat biasa. Hal tersebut, berdampak pada menurunnya kepercayaan rakyat pada aparat.

Kelima, di dalam proses pelayanan kesehatan masyarakat. Dimana kebijakan soal pelayanan kesehatan gratis rupanya belum berjalan sebagaimana yang digadagadangkan. Hal itu berimbas pada terenggutnya hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Rasionalitas-rasionalitas teknis tersebut mempengaruhi munculnya respon berupa kritik-kritik sosial sebagai wujud komunikasi membebaskan dengan tujuan membuka ruang publik, sehingga isu yang dikritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik.

Pertama, kritik terhadap sistem kurikulum pendidikan yang terdapat pada Novel *Men Cobleng*, menekankan pada akibat yang ditim-bulkan dari ketidaksiapan sebuah kurikulum, yang akhirnya merugikan anak dan orang tua siswa, serta ketidakmaksimalan pembelajaran. Protes soal kebijakan yang tidak jelas, tidak ada gunanya dan malah balik merugikan masyarakat sendiri.

Kedua, kritik terhadap panasnya kehidupan politik dan permainan didalamnya, menjurus pada bagaimana perilaku dan kegiatan yang dilakukan petinggi dan partai-partai terutama terkait dengan pemilu, yang nampak seperti sedang memperdaya rakyatnya dengan mengembangkan isu-isu demi meraih suara. Selain itu, aturan yang benar terkait pemilu pun malah ditolak, sehingga menambah kecurigaan bahwa masih ada pihak yang mau melanggengkan permainan politik yang kotor.

Ketiga, kritik terhadap kebijakan ekonomi. Dimana kebijakan yang seharusnya menjadi harapan yang mampu menyelesaikan masalah rakyat miskin, justru sebaliknya. BLSM dengan nominal yang sangat sedikit, tidak tepat sasaran, dan cenderung bersifat sementara, malah membuat rakyat ketergantungan dan tidak bisa mandiri dalam mencari pendapatan yang lebih baik. Karena tidak ada kebijakan yang memikirkan nilai kompetensi kerja bagi rakyatnya, padahal hal itu justru akan membantu masyarakat secara jangka panjang.

Keempat, kritik terhadap ketidakadilan penegakan hukum. Poinnya mengenai hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terutama yang disentil dalam novel adalah kasus korupsi yang menyangkut dua aparat tinggi, Susno Duadji dan Djoko Susilo yang justru lebih longgar, tidak seperti proses peradilan bagi kasus-kasus sepele yang menyeret rakyat kecil.

Dan kelima, kritik terhadap pelayanan kesehatan. Dimana proses pelayanan kesehatan masih tidak memadai bagi semua orang, belum lagi, kebijakan yang seharusnya menjadi penolong bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak malah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung dan terkena dampak dari ketidaksiapan, kejanggalan, dan kecacatan dari kebijakan, serta tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Saran

Kajian dengan teori kritik Jurgen Habermas, jarang dilakukan, sehingga referensi penerapan teori tersebut dalam pengkajian sastra juga masih terbatas. Teori sosial kritis Jurgen Habermas sebenarnya memang cukup rumit sehingga butuh waktu dan fokus dalam pemahamannya.

Fokus dalam pengkajian dengan teori Habermas dalam karya sastra, pada dasarnya lebih menitik beratkan pada pembacaan realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara kritis. Dengan harapan hasil pembacaan dapat mendukung tujuan dari sumber data (karena sifatnya yang emansipatoris). Untuk itu, bagi yang ingin melakukan kajian dengan teori kritik, diharapkan dapat memahami konsep tersebut, serta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar dalam teori kritis Habermas, sehingga pengaplikasian teori untuk pembedahan karya sastra dapat lebih baik dan sesuai dengan kepentingan serta tujuan teori kritis itu sendiri.

Teori Kritis sendiri sebenarnya cukup luas. Sementara, penelitian ini hanya berfokus pada pembacaan rasionalitas teknis dan kritik sosial yang hadir dalam novel. Dalam artian, penelitian ini, masih dalam tataran permukaan dari teori kritis Habermas sendiri, atau bahasan dasar mengenai teori tersebut. Selain itu, teori kritis sebenarnya juga lebih spesifik mengarah pada teori tindakan komunikatif. Pengembangan penelitian ini, selanjutnya dapat berupa kajian mengenai hal tersebut, karena pada dasarnya kritik juga merupakan bentuk komunikasi. Namun sayangnya karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, pembahasan mengenai tindakan komunikatif belum sempat dipelajari lebih lanjut.

Novel *Men Cobleng* adalah novel yang dekat dengan isu-isu sosial terjadi di masyarakat. Jadi, kemungkinan juga menarik untuk dibahas dengan perspektif sosiologis lain, seperti teori relasi kuasa Michel Foucault, atau teori tindakan sosial Max Weber.

DAFTAR PUSTAKA

Abar, Akhmad Zaini. 1997. *Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia*. Jurnal UII: UNISIA No. 32/XVII/IV/1997.

- Ahmadi, Anas. 2019. *Metode Penelitian Sastra: Perspektif Monodisipliner dan Interdisipliner*. Gresik: Penerbit Graniti
- Al- Amin, Muhammad Afsa Nasih. 2018. *Kritik Sosial dalam Novel Balada Gathuk Gathuk Karya Sujiwo Tejo (Kajian Sosial Kritis Jurgen Habermas)*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
- Andayani, Dwi. 2018. *Sumbangan Dana Kampanye Pilkada Dibatasi, Ini Aturannya*. DetikNews (online) <https://news.detik.com/berita/d-3867799/sumbangan-dana-kampanye-pilkada-dibatasi-ini-aturannya> diakses pada 25 April 2022
- CNN Indonesia. 2018. *Tahun Panas 2018: Tarung Klasik Capres & Bursa Alot Cawapres*. CNN Indonesia (online) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181218185247-32-354680/tahun-panas-2018-tarung-klasik-capres-bursa-alot-cawapres> diakses pada 25 April 2022
- Detik News .2012. *Ini Awal Kisah Kasus Korupsi yang Menjerat Irjen Pol Djoko Susilo*. Detikcom (online) <https://news.detik.com/berita/d-1979368/ini-awal-kisah-kasus-korupsi-yang-menjerat-irjen-pol-djoko-susilo> diakses 25 April 2022
- Hatta, Raden Trimutia. 2013. *Menelusuri Rimbanya Susno Duadji*. Liputan 6.com (online) <https://www.liputan6.com/news/read/572499/menelusuri-rimbanya-susno-duadji> diakses 25 April 2022
- Habermas, Jürgen, 1998, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, translated William Rehg. Cambridge: MIT Press
- Habermas, Jurgen. 2018. *Moral Consciousness and Communicative Action*, translated by Christian Lenhardt, Shierry Weber NicholSEN. Cambridge: Polity Press
- Hudhana, Winda Dwi & Mulasih. 2019. *Metode Penelitian Sastra: Teori dan Aplikasi*. Temanggung: Desa Pustaka
- Liu, Hindra. 2012. *SBY Klaim BLT Bermanfaat*. Kompas.com (online) <https://nasional.kompas.com/read/2012/03/19/01013911/~Nasional> diakses 25 April 2022
- McCarthy, Thomas. 2006. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Terjemahan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- McCarthy, Thomas. 2011. *Metodologi Teori Kritis Jurgen Habermas*. Terjemahan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Nurghiyntoro, Burhan. 2013. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Rusmini, Oka. 2019. *Men Cobleng*. Grasindo: Jakarta
- Sendari, Anugerah Ayu. 2019. *Tujuan Kurikulum 2013 di Balik Pro Kontra Penerapannya*. Liputan6.com

(online)

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3875318/tujuan-kurikulum-2013-di-balik-pro-kontra-penerapannya> diakses 6 April 2022.

- Pusey, Michael. 2011. *Habermas: Dasar dan Konteks Pemikirannya*. Yogyakarta: Resist Book
- Sudrajat, Ajat. *Jurgen Habermas: Teori Kritis Dengan Paradigma Komunikasi*. Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY
- Shaid, Nur Jamal. 2022. *Mengenal 4 Fungsi Pajak bagi Pembangunan Negara*. Kompas.com (online) <https://money.kompas.com/read/2022/03/24/190357726/mengenal-4-fungsi-pajak-bagi-pembangunan-negara?page=all> diakses pada 25 April 2022
- Supraja, Muhammad. 2018. *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Tempo. 2013. *Bayi Meninggal Setelah Ditolak 10 Rumah Sakit*. Tempo.co. (online) <https://metro.tempo.co/read/462143/bayi-meninggal-setelah-ditolak-10-rumah-sakit> diakses pada 15 Mei 2022.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni*. Universitas Negeri Surabaya.
- Tjahyadi, Sindung. 2003. *Teori Kritis Jurgen Hubermas: Asumsi-Asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial*. Jurnal Filsafat: Agustus, Jilid 34, Nomor 2.
- Ulya, Fika Nurul, 2019. *6 Kendala Ini Membuat Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tak Maksimal*. Kompas.com (online) <https://money.kompas.com/read/2019/08/19/171503026/6-kendala-ini-membuat-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-tak-maksimal?page=all> diakses 6 April 2022
- Welek, Rene & Austin Waren. 2016. *Teori Kesusastraan*. Terjemahan oleh Melani Budianta. Jakarta: Gramedia
- Wibowo, Ary. 2012. *Kejamnya Keadilan "Sandal Jepit"*. Kompas.com (online) <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.?page=all> diakses pada 25 April 2022